

ABSTRAK

Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara dan pada ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemiskinan dan anak terlantar yang terjadi di Kabupaten Banyumas menuntut kehadiran Pemerintah, khususnya Dinas Sosial, dan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas (yang selanjutnya disingkat Dinsospermades), sesuai fungsinya yaitu menyelenggarakan program kesejahteraan sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu data diperoleh , dipilih, dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan yang dibuat oleh Dinsospermades Kabupaten Banyumas dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar berupa strategi peningkatan kualitas pelayanan dan kuantitas bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan diri melalui bimbingan dan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, mengupayakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, pelaporan, pengembangan sumberdaya manusia aksesibilitas, pembinaan masyarakat dan lingkungan sosial. Pencapaian Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas pada Tahun 2013-2018 berupa penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas yang semula pada Tahun 2016 berjumlah 890.568 Jiwa menjadi 859.468 Jiwa pada Tahun 2017, tercapainya kesadaran masyarakat di desa kalisari, cilongok, teluk, sumpiuh, patikraja, dan sokaraja dalam mengubah lingkungan yang kumuh menjadi bersih dan nyaman karena telah diberikan pelatihan, pemberian, dan pemasangan paving oleh Dinsospermades Kabupaten Banyumas yang sudah berjalan sejak tahun 2014, Program Penerima Keluarga Harapan (PKH) setidaknya ada 62.900 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Banyumas.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin dan anak terlantar, antara lain masih terbatasnya kapasitas daya tampung panti/ unit rehabilitasi sosial dibandingkan dengan jumlah PMKS yang dikirim atau dirujuk, masih rendahnya minat fakir miskin dan anak terlantar dalam mengikuti bimbingan sosial dan pelatihan – pelatihan kerja yang telah disiapkan, masih terdapat orang miskin yang memerlukan tetapi masih belum terdata dalam Basis Data Terpadu,

Kata Kunci : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Fakir Miskin, Anak Terlantar